

Deradikalisasi Islam dalam Perspektif Pendidikan Agama

Zuly Qodir

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

e-mail: zuly_qodir@yahoo.com

DOI: 10.14421/jpi.2013.21.85-107

Diterima: 11 April 2013

Direvisi: 22 Mei 2013

Disetujui: 11 Juni 2013

Abstract

Physical or non physical terrorism is a form of radicalization that is considered the most extreme for applying new methods of relative in radicalization religion. The ideological war which is considered as the most advanced form of radicalization is a continuation of the religious world and the radicalization of form since 2000 in Indonesia. To reduce the various forms of religious radicalisation, the formal education is developed in Indonesia. The religious radicalization is a variant of the extreme movement that could be detrimental to Muslim in Indonesia based on data of literature, media studies and field observations.

Keywords: *Radicalization, Religious Education, Terrorism*

Abstrak

Terorisme fisik ataupun non fisik merupakan bentuk radikalisasi yang dianggap paling ekstrem sebab mempergunakan metode yang relative baru dalam radikaliasi agama. Peperangan ideologis yang dianggap sebagai bentuk paling mutakhir dari radikalisasi merupakan kelanjutan dari bentuk radikalisasi agama yang marak sejak tahun 2000-an di Indonesia. Untuk mengurangi berbagai bentuk radikalisasi agama di Indonesia, jalur pendidikan formal yang berkembang di Indonesia. Radikalisasi agama merupakan varian dari gerakan ekstrem yang bisa merugikan umat Islam di Indonesia, berdasar data literature, kajian media dan observasi lapangan.

Kata Kunci : Radikalisasi, Pendidikan Agama, Terorisme

Pendahuluan

Terorisme di era modern dipicu oleh berbagai macam faktor, seperti faktor politik, ekonomi, ideologi, dan akibat kolonialisme modern dan globalisasi.¹ Seperti berdasarkan laporan *Patterns of Global Terrorism* tahun 2000, yang dikeluarkan oleh Pemerintah AS, gerakan terorisme yang bermotif agama dan ideologilah yang paling banyak terjadi. Mengapa persoalan terorisme berdasarkan ideologi keagamaan menjadi sangat populer? Hal itu karena agama merupakan salah satu dari sekian banyak identitas yang mampu membuat sentimen personal bahkan komunal sehingga masyarakat bersedia berbuat apa saja untuk membela agama. Di sinilah persoalan ideologi keagamaan sering menjadi titik tolak dalam menggunakan cara-cara kekerasan dalam menghadapi pelbagai persoalan dalam realitas kehidupan.²

Namun, hal yang sebenarnya tidak dapat kita lupakan saat ini adalah terorisme itu dapat berupa aktivitas *non violence (terror of mind)* dan terorisme yang berwujud aktivitas kekerasan (*violence activity*). Hal lainnya adalah adanya penggunaan istilah *state of terrorism* dan *civil of terrorism*, yang keduanya sama-sama berbahaya. Namun, seringkali pembicaraan mengarah pada apa yang kita namakan *civil terrorism*, sementara *state terrorism* tidak atau jarang dibahas oleh banyak pihak, termasuk akademisi.³

Juergensmeyer, dalam tulisan yang lain menyatakan bahwa berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, politik, agama dan identitas memang dapat menimbulkan gerakan terorganisir yang dapat terlibat dalam terorisme, akan tetapi kondisi tersebut tidak lantas menjamin dilakukannya kekerasan. Persoalan kerentanan sosial, ekonomi, rasa kehilangan peluang politik dan ekspresi identitas menjadi kekhususan dalam keagamaan, seperti ibadah dan ritual. Untuk dapat terjadi kekerasan biasanya harus digabungkan dengan faktor-faktor lain, seperti doktrin ideologi yang ditanamkan oleh pemimpin kharismatik, pengembangan sistem rekrutmen yang efektif, dan organisasi yang mapan.⁴ Terorisme dari hal itu padaakhirnya memang disadari dapat muncul akibat doktrin dan pemahaman agama secara radikal, meskipun pada dasarnya semua agama membawa misi kebaikan. Oleh sebab itu, menjadi hal yang urgen untuk sebuah aktivitas atau program deradikalisasi agama dikerjakan di Indonesia, yang penduduknya mayoritas beragama Islam (mencapai 87 %) dari total penduduk Indonesia 240 juta jiwa.⁵

¹ Peter Beyer, *Religion and Globalization* (New York: Sage Publication, 2002), hlm. 5.

² Penjelasan mengenai terror yang dilakukan atas nama agama dapat diperiksa secara detail dalam buku Mark Juergensmeyer, *Terror in the Mind of God* (California, USA: Springer, 2002), 221.

³ Ariel Heryanto, *State Terrism and Democracy in Indonesia* (Singapura: ISEAS, 2007), hlm. 126

⁴ Mark Jergensmeyer, (ed), *Religion, Globalization and Civil Society* (Toronto, USA :Sage Publication, 2009), hlm. 45.

⁵ Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010.

Islam sebagai pembawa misi ketuhanan berusaha menciptakan *maslahah*, perdamaian, persatuan, keadilan, kesetaraan, dan menumpas semua bentuk kezhaliman termasuk teror. Terlebih teror yang dilakukan dengan membawa nama agama, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan jihad, membela Tuhan dan *embel-embel* agama lainnya. Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* melindungi umat manusia secara mutlak, tanpa melihat latar belakang ideologi, etnis dan bangsa. Gagasan tentang perdamaian melalui agama Islam, seperti disampaikan oleh Mohammad Abu Nimer, sebenarnya sebuah gagasan yang hendak menurunkan nilai-nilai kedamaian dalam Islam dalam praktek hidup sehari-hari. Hanya saja semua terletak pada para penganutnya, terutama para pemimpin agama apakah bersedia untuk mengumandangkan perdamaian atautkah akan mengumandangkan peperangan atas nama agama.⁶

Ajaran-ajaran agama yang membawa pesan perdamaian, kerukunan, persatuan, keadilan memberikan dan menjamin HAM dapat tereduksi oleh pemahaman fanatis dan picik terhadap teks-teks agama yang ahistoris. Pemahaman yang picik malah akan mereduksi tujuan, visi dan misi Islam sebagai agama cinta dan perdamaian. Egoisme beragama untuk mendapatkan predikat *mujahid* yang *syahid*, egoisme untuk mendapatkan surga yang diyakini dan direalisasikan dengan tindakan destruktif dapat mengorbankan perdamaian, mencabik rajutan persatuan dan kerukunan umat. Gagasan damai dengan sendirinya akan memupuk adanya kesejahteraan hidup dan keselamatan di muka bumi sebab semua itu merupakan cita-cita yang tertuang secara substansial dan faktual dalam teks keislaman. Terkadang gagasan yang sangat mendalam tentang misi perdamaian dari agama-agama, terutama agama Ibrahim, seakan-akan tertutup oleh gagasan kekerasan yang hanya sempalan dari agama-agama.⁷

Terlepas dari indahnya ajaran agama, memang harus diakui, bahwa salah satu faktor terorisme adalah karena motivasi agama, yaitu karena proses radikalisasi agama dan interpretasi serta pemahaman keagamaan yang kurang tepat dan keras yang pada gilirannya melahirkan sosok muslim fundamentalis yang cenderung ekstrem terhadap kelompok lain dan menganggap orang lain yang berbeda sebagai musuh sekalipun satu agama, apalagi berbeda agama. Teks-teks agama ditafsirkan secara atomistik, parsial-monolitik (*monolithic-partial*), sehingga menimbulkan pandangan yang sempit dalam beragama. Kebenaran agama menjadi barang komoditi yang dapat dimonopoli. Ayat-ayat suci dijadikan justifikasi untuk melakukan tindakan radikal dan kekerasan dengan alasan untuk menegakkan kalimat Tuhan di muka

⁶ Mohammad Abu Nimer, *Nir Kekerasan dan Bina Damai dalam Islam: Teori dan Praktek*, Diterj. oleh: Irsyad Rafsyadi dan Khairil Azhar, (Bandung: Alfabeta dan Paramadina, 2010), hlm. 235-246.

⁷ Khaled Abou el-Fadhl, *Atas Nama Tuhan* (Jakarta: Serambi, 2004), hlm. 123; Farid Esack, *Al Quran, Pluralism and Liberalism*, (USA: Pinguin Books, 2001), hlm. 234.

bumi ini. Aksi radikalisme inilah yang sering mengarah kearah aksi teror. Kejadian yang mengerikan ketika hancurnya *twin tower* di WTC tahun 2002, sebagai peristiwa *September Eleven*, maka dimensi kekerasan ini menggugah pemerintah untuk menggunakan pendekatan agama, yaitu dengan melakukan deradikalisasi agama.

Sesungguhnya gagasan tentang Islam *nir*kekerasan, yang pernah dikemukakan oleh Abdurrahman Wahid, Hasan Hanafi, dan Nasir Hamid Abu Zaid, memberikan penjelasan lain bahwa Islam sebenarnya agama yang sangat mencintai perdamaian (*non* kekerasan). Abdurrahman Wahid ketika itu sebagai tokoh dunia (internasional) menggagas perlunya perspektif teologi Islam yang mendorong adanya tindakan *nir* kekerasan. Sebagai salah satu presiden World Conference Religions and Peace (WCRP), sekaligus sebagai pendiri Indonesian Conference Religions and Peace (ICRP), Abdurrahman Wahid bersama Syafii Maarif, Rm. Ismartono, Rm. Mudji Sutrisno, dan beberapa lainnya berupaya menggalang perspektif keislaman yang *nir* kekerasan.⁸

Oleh karena itu, gagasan tentang deradikalisasi agama ini ditempuh sebagai salah satu carapenanggulangan terorisme yang bersifat *non violencem* melalui cara represif, proses hukum, penangkapan, penyidikan dan eksekusi dirasa kurang efektif, karena cara tersebut kurang menyentuh pada akar permasalahan yang sesungguhnya. Cara represif dengan pendekatan militeristik seperti penangkapan dan bahkan penembakan pelaku teror merupakan langkah memotong aksi teror dari tengah yang dianggap oleh banyak pihak tidak efektif. Para pelaku teror ternyata tidak juga menghentikan kekerasan, bahkan karena alasan membalaskan dendam saudaranya yang telah dieksekusi mati oleh aparat keamanan, alasan penahanan yang tidak sesuai prosedur, dan berbagai jenis tindakan negara atas mereka yang dituduh dan tertangkap menjadi teroris, maka kekerasan pun bermunculan dengan kekerasan baru. Kekerasan yang dibalas dengan kekerasan, dalam teori resolusi konflik, memang akan memunculkan kekerasan baru. Darihal itulah kemudian dicari metode lain untuk menghentikan berbagai macam terorisme.⁹

Meskipun deradikalisasi agama menjadi suatu keniscayaan dalam rangka penanggulangan terorisme sekaligus untuk memutus mata rantasi radikalisme, meskipun demikian, ada masalah yang perlu diperhatikan oleh para penentu dan pelaksana kebijakan terkait deradikalisasi agama. Terdapat sejumlah problem yang dihadapi dalam proses deradikalisasi agama, yakni di antaranya agama menjadi lahan tarik-menarik antara para pelaku radikalisme dengan aktivis perdamaian agama di Indonesia. Keduanya saling menggunakan metode yang memungkinkan

⁸ Abdurrahman Wahid, dkk., *Islam nir Kekerasan* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 45-56.

⁹ Muhammad Nurul Huda, *Aku Mantan Teroris* (Bandung: Mizan, 2010), hlm. 25

masyarakat dapat tertarik atas mereka. Siapa yang paling kuat dan menarik dalam membuat aktivitas itulah yang akan mendapatkan simpati atau mendapatkan dukungan publik. Kasus penangkapan Imam Samudra, Muhlas, Umar Patek dan Dzulmatin mendapatkan perhatian publik, sebab melibatkan aparat keamanan. Namun, tidak serta merta pemahaman masyarakat tentang mereka semua adalah teroris, sebagian bahkan menganggap mereka adalah “pahlawan Islam”. Inilah masalah yang serius.

Problem krusial lainnya antara lain adalah orang-orang yang telah menerima doktrin dan proses radikalisisasi agama akan sulit menerima deradikalisasi agama. Hal ini karena pemikiran dan hati mereka telah terisi doktrin-doktrin agama secara radikal, sehingga tidak ada lagi “ruang kosong” dalam pikiran dan hatinya untuk menerima pemahaman agama yang tidak sesuai dengan apa yang selama ini mereka terima dan yakini. Berbeda halnya apabila deradikalisasi agama dilakukan oleh orang yang sebelumnya tidak mengalami doktrin-doktrin radikal agama. Sekalipun deradikalisasi sebagai program aktivitas untuk membendung radikalisisasi masih diperdebatkan, akan tetapi memiliki manfaat yang relevan jika dihubungkan dengan maraknya pelbagai aktivitas radikalisme yang ekstrem di Indonesia. Radikalisme sendiri masih menyimpan perdebatan panjang dikalangan aktivis Islam sebab konotasi radikalisme yang negatif ditolak oleh sebagian dari mereka yang memahami bahwa radikalisme adalah keharusan dalam beragama.¹⁰

Sebagaimana telah *mafhum* bahwa agama terdiri dari dua unsur yaitu: unsur lahiriyah, *body* dan unsur *bathiniyah* yang berupa keyakinan dan nilai-nilai moral etik agama. Agama pada tataran batiniah akan susah untuk mengalami pergeseran, karena ia berupa kepercayaan dan keyakinan yang telah terpatri di dalam hati. Keyakinan akan sebuah kebenaran, pahala, keselamatan, kebatilan, dosa, kesesatan dan sebagainya. Ketika telah tertanam suatu keyakinan akan sebuah kebenaran yang diperoleh dari interpretasi teks dengan perspektif eksklusif, pendekatan radikal, dengan keyakinan absolutisme kebenaran intepretasi, maka akan sulit untuk menggeser atau bahkan merelokasi keyakinan tersebut.

Proses deradikalisasi agama terhadap orang-orang yang sudah menerima doktrin sangat berbeda dengan proses radikalisisasi. Radikalisisasi agama relatif lebih mudah diterima karena dilakukan terhadap orang yang seringkali minim penguasaan agama dan basis ilmu agamanya kurang mendalam atau bahkan tidak punya sama sekali. Oleh karena itu, mereka cukup mudah untuk menerima ajaran agama yang mereka yakini tepat dan sesuai dengan praktik Rasulullah saat itu. Karena, ada “ruang kosong” dalam pemikiran dan hati mereka. Dalam perspektif

¹⁰ Wawancara informal setelah acara seminar di Universitas Islam Indonesia dengan Irfan S. Awwas di Yogyakarta pada Tanggal 20 Februari 2013

psikologi, sesungguhnya sebagian umat manusia itu memiliki kecenderungan pada hal-hal yang baru dan memberikan rasa keselamatan, apakah datang dari agama ataukah dari yang lainnya. Afilisasi keagamaan akan sangat mudah diterima ketimbang afilisasi politik atau afilisasi ekonomi terkait dengan keyakinan.¹¹

Problem serius lain dari deradikalisasi agama seringkali dilakukan secara sporadis dan hanya formalitas dengan paradigma proyek penanggulangan terorisme, sehingga dapat dipastikan tidak efektif melawan radikalisasi agama yang dilakukan secara sistematis, intensif, terencana dan disiplin. Terlebih lagi radikalisasi agama dilakukan dengan jargon ketulusan dan semangat keyakinan bahwa hal itu dilakukan demi menegakkan kalimat Tuhan serta demi tegaknya syariat Islam yang akan dibalas dengan surga. Janji-janji serta jargon surgawi seringkali mendapatkan pembenaran dari pelbagai doktrin kitab suci dan teks-teks suci lainnya, sehingga mereka yang mendapatkan pendidikan atau *training* dan pelatihan radikalisasi akan dengan semangat membela apa yang telah diperoleh selama ini.

Oleh karena itu, walaupun deradikalisasi agama dilakukan terhadap orang yang telah mengalami radikalisasi agama seringkali hal itu tidak akan bisa menghilangkan bekas dan dampak radikalisasi agama secara penuh. Bisa jadi hal itu hanya bersifat sementara. Hal ini dapat dilihat dari fakta adanya pelaku teror yang merupakan alumnus deradikalisasi agama, yaitu Abdullah Sonata dan Abu Tholut yang melakukan aksi terorisme melalui Jaringan Anshorut Tauhid (JAT). Mereka sebelumnya merupakan anggota atau kelompok jaringan Jamaah Islamiyah pimpinan Azhari bahkan disinyalir sebelumnya merupakan alumni-alumni perang Afganistan bersama Osamah Bin Laden.¹²

Deradikalisasi agama dilakukan pemerintah dengan menggandeng ormas-ormas keagamaan seperti NU, Muhammadiyah dan ormas lainnya yang mempunyai pemikiran keagamaan yang moderat dapat dianggap sebagai bagian dari metode mengurangi dampak dan gerakan radikalisasi di Indonesia. Masalahnya apakah pemikiran keagamaan ormas-ormas moderat tersebut dapat diterima oleh kalangan lain yang memiliki *frame* pemikiran keagamaan yang berbeda; yakni mereka yang berpandangan bahwa Muhammadiyah maupun NU merupakan ormas Islam yang kurang bersemangat dengan gerakan penegakan syariat Islam alias Negara Islam? Karena, pada umumnya muslim fundamentalis-radikal yang telah mengalami radikalisasi agama bersikap sangat eksklusif dan tertutup dari orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka.¹³

¹¹ David Martha, *Psychology of Religion* (England: Oxford, 2002), hlm. 192.

¹² Bilveer Singh, *Talibanization and Extremism in Southeast Asia*, (Singapura: ISEAS, 2007), hlm. 234

¹³ Dalam banyak forum, MMI misalnya selalu mengatakan bahwa Muhammadiyah dan NU itu ormas Islam yang tidak berani secara tegas mendukung syariat Islam, dalam maknanya mendirikan

Problem-problem deradikalisasi di atas hendaknya menjadi bahan pertimbangan dan pemikiran para pemegang kewenangan dalam proyek deradikalisasi agama dan penanggulangan terorisme di Indonesia, termasuk di dalam perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan, sebab belakangan ini radikalisme mengarah kaum muda terutama pelajar kelas menengah atas dan mahasiswa. Dengan melihat problem di atas, bukan berarti deradikalisasi agama tidak perlu, akan tetapi perlu strategi yang tepat dan konsep yang jelas agar proses deradikalisasi agama berjalan efektif dan berhasil maksimal. Selain itu, deradikalisasi agama juga harus dilakukan lebih awal dan sedini mungkin terutama dilakukan pada orang-orang yang belum mengalami radikalisme agama; dilakukan terhadap siswa sekolah agar benar-benar efektif dan menjadi salah satu solusi penanggulangan terorisme.

Perspektif Radikalisme Islam

Radikalisme merupakan suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan penjabaran terhadap suatu sistem di masyarakat sampai ke akarnya. Bilamana perlu menggunakan cara-cara kekerasan. Radikalisme menginginkan adanya perubahan secara total terhadap suatu kondisi atau semua aspek kehidupan masyarakat. Kaum radikal menganggap bahwa rencana-rencana yang digunakan adalah rencana yang paling ideal. Tentu saja melakukan perubahan (pembaruan) merupakan hal yang wajar dilakukan bahkan harus dilakukan demi menuju masa depan yang lebih baik. Namun, perubahan yang sifatnya revolusioner seringkali “memakan korban” lebih banyak sementara keberhasilannya tidak sebanding. Oleh sebab itu, sebagian ilmuwan sosial menyarankan perubahan dilakukan secara perlahan-lahan tetapi kontinyu dan sistematis, *ketimbang* revolusioner tetapi tergesa-gesa.¹⁴

Terkait dengan radikalisme, hal itu seringkali beralaskan pemahaman sempit agama yang berujung pada aksi teror bom tumbuh bersama sistem. Sikap ekstrem ini berkembangbiak di tengah-tengah panggung yang mempertontonkan kemiskinan, kesenjangan sosial, atau ketidakadilan. Perilaku elite politik yang tidak akomodatif terhadap kepentingan rakyat dan hanya memikirkan kelompok atau partainya menjadi tempat persemaian subur bagi radikalisme. Karena itu, memberangus radikalisme tidak cukup hanya dengan menangkap dan

Negara Islam dan mengganti Pancasila dengan Islam sebagai dasar negara. Sebab, MMI dan HTI misalnya selalu mengkampanyekan bahwa mereka mengusung Islam sebagai dasar negara dan syariat sebagai solusi Negara, meskipun tidak didukung oleh Muhammadiyah dan NU. Seperti disampaikan Irfan S. Awwas dan Tinjo Supratiknyo, “Negara Islam dalam Negara Pancasila”, *Makalah*, di PSI UII pada Tanggal 14 Februari 2013.

¹⁴ Pior Stompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 223.

menggiring para pelaku teror ke pengadilan. Bahkan hukuman mati tidak cukup untuk memadamkan kobaran radikalisme. Perbaikan kehidupan masyarakat dari kesengsaraan menjadi kesejahteraan, dari kebodohan menjadi kecerdasan, dari ketidakadilan hukum menjadi keadilan hukum serta dari peminggiran menjadi kerjasama merupakan hal yang harus dilakukan oleh pemerintah dan segenap aparaturinya. Kasus pelbagai pemboman yang dilakukan beberapa kelompok radikal di Indonesia sepanjang Orde Baru adalah hal yang menunjukkan adanya tingkat kekecewaan yang sangat tinggi kepada rezim politik sehingga jalan kekerasan menjadi alternatif penyelesaian; sekalipun tidak menyelesaikan masalah sama sekali kecuali meninggalkan beban jiwa dan material karena rusak dan kematian. Namun, hal itu memuaskan mereka.¹⁵

Dalam kasus Indonesia misalnya, penerapan syariah secara formal di Indonesia bukan hanya mimpi sebagian besar umat Islam, tetapi juga kekhawatiran banyak pihak, termasuk sebagian umat Islam. Di sisi lain, diversitas agama dan budaya merupakan fakta yang tidak mungkin dinafikan. Bagaimana universalitas Islam berhadapan dengan fakta diversitas agama dan budaya? Bagaimana kesetiaan kepada keimanan memungkinkan seseorang hidup dalam keragaman budaya dan fakta diversitas tersebut? Kondisi multikultur dan pluralism adalah hal yang tidak mungkin ditolak keberadaannya, akan tetapi sebagian dari umat Islam tetap menolak penggunaan istilah multikulturalisme dan pluralism sebab dua istilah ini dipahami secara serampangan sebagai gerakan untuk meniadakan perbedaan agama-agama dan budaya. Istilah tersebut adalah pengkaburan keimanan masyarakat sehingga masyarakat muslim tidak kuat imannya. Padahal istilah multikulturalisme dan pluralism merupakan istilah yang paling representatif untuk menggambarkan kondisi masyarakat pasca modern sekarang ini.¹⁶

Pada dasarnya, syariah bukan sekedar “*penal code*”, tetapi merupakan sebuah visi global yang dapat memancarkan pencerahan universal untuk seluruh makhluk Tuhan kapanpun dan dimanapun ia berada. Ia adalah sebuah konsep hidup dan mati, *weltanschauung* yang berasal dari bacaan normatif dari sumber otoritas Islam, tetapi memungkinkan untuk dieksternalisasikan, selain tentu saja melakukan internalisasi atas apa yang dipahami sehingga memunculkan sebuah makna global dan memberi refleksi fungsional dalam kehidupan. Gagasan melakukan internalisasi dan eksternalisasi dalam perspektif sosiologis sebenarnya merupakan sebuah bangunan yang menghendaki adanya pemahaman yang memadai dan

¹⁵ Ted Robert Gurr, *Why Men Rebel* (USA: Princeton University Press, 1969). Dalam buku ini Robert Gurr mengintrodusir bahwa kekecewaan atas rezim politik akan sangat mungkin menumbuhkan kekerasan yang mendalam sehingga melahirkan pemberontakan atas sistem yang berjalan. Penjelasan khusus mengenai masalah deprivasi relatif dapat diperiksa pada Bab 3 dan 4.

¹⁶ Zuly Qodir, *Kesalahpahaman Multikulturalisme*, Kompas Terbit Tanggal 26 Februari 2013.

disebarluaskan pada publik sehingga suatu saat nanti akan menjadi pemahaman public. Itulah yang dalam sosiologi dikenal dengan objektivasi.¹⁷

Apabila kita mendefinisikan syariah sebagai sebuah visi global, maka kita harus mengintegrasikan dalam persepsi kita tentang bagaimana tetap setia dalam keimanan kita dan menganggap bahwa semua yang baik (misalnya di Indonesia atau dimanapun) adalah bagian dari syariah. Misalnya, apabila kita membaca sebuah aturan di negeri ini yang didalamnya terdapat konsep tentang keadilan maka kita harus menerimanya bukan hanya karena kita memiliki kontrak moral kesetiaan sebagai warga negara tetapi juga karena ia merupakan bagian kesadaran terdalam kita tentang ajaran syariah. Dengan mengikuti perintah konstitusi berarti kita telah bersyariah dan telah mengindonesiakan syariah. Kita tidak diperbolehkan untuk berparadigma dan bermental ganda, yakni ketika untuk pihak sendiri dianggap sebagai sesuatu yang baik, tetapi ketika pada pihak lain dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik. Keimanan model seperti ini yang oleh Ninian Smart disebut sebagai sebuah toleransi yang malas (*lazy tolerance*) karena menganggap pihak sendiri paling baik dan benar sementara pihak lain tidak seperti dirinya.¹⁸

Umat Islam dituntut untuk merevitalisasi dan meletakkan makna divinitas dan universalitas keimanannya dalam konteks sosial, budaya dan politik. Tentu saja tidak sependapat kalau dikatakan bahwa keimanan harus direlatifkasi. Tetapi bagaimana divinitas dan universalitas iman itu sebenarnya berhadapan dengan fakta diversitas. Ada perbedaan yang jelas antara keimanan kepada Tuhan dan ketaatan pada peraturan negara, inilah sebagai gagasan bagian dari agama publik. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan wahyu telah memaksa kita memahami diversitas kemanusiaan dan budaya. Kita tentu tidak akan mau merelatifkasi nilai-nilai universal agama, tetapi bagaimana nilai universal itu dapat mengakomodir *diversity of humanity and civilization*. Inilah gagasan dari *civil religion* yang belakangan kita kenal dengan sebutan agama publik. Agama sebagai sebuah keyakinan pribadi hadir ditengah banyak orang yang berbedabeda agama, etnis, kultur serta kelas sosial.¹⁹

Dalam persepektif seperti itu, maka *syari'ah* adalah eksternalisasi dari sebuah sumber yang *divinely revealed* yang memiliki validitas universal dan pandangan hidup

¹⁷ Peter L Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Kajian Sosiologi Pengetahuan*, (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 225; Periksa juga Karl Manheim, *Sosiologi Pengetahuan: Pertautan Pengetahuan dan Politik* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 226.

¹⁸ Ninian Smart, *One God and Others Name in the World* (USA: Temple University Press, 2002), hlm. 112.

¹⁹ Jose Casanova, *Agama Publik, Agama di Era Modern* (Malang: Resist dan UMM Press, 2007), hlm. 230; Robert N. Bellah, *Beyond Belief: Gagasan tentang Civil Religion di Amerika* (Jakarta: Paramadina, 2003), hlm. 23

yang komprehensif, bukan hanya karakteristik budaya dari sebuah komunitas atau populasi tertentu yang datang dari luar Indonesia. *Syari'ah* kompatibel untuk semua tempat dan waktu dengan syarat bahwa ia harus mengalami proses penyesuaian radikal dengan waktu dan tempat di mana ia dipedomani. Di Amerika misalnya, *syari'ah* dapat menenteramkan hati orang Islam dan orang Amerika kalau *syari'ah* di-Amerika-kan. Di Eropa, *syari'ah* dapat menjadi sumber inspirasi dan memberi ketenangan hidup serta dapat mendekatkan umat Islam Eropa dengan Tuhannya dengan syarat *syari'ah* di-Eropa-kan. Demikian pula di Indonesia, *syari'ah* dapat menjadi pegangan hidup yang dapat diimplementasikan dan sekaligus *compatible* dan produktif kalau *syari'ah* mengalami proses Indonesianisasi. Dengan kata lain, *syari'ah* dengan segala turunan implementasinya dapat berbeda dari satu tempat ketempat yang lain. Implementasi *syari'ah* di Afrika berbeda dengan penerapan *syari'ah* di Amerika. *Syari'ah* di Eropa tidak sama dengan *syari'ah* di Timur Tengah atau Indonesia. Hanya dengan penyesuaian radikal antara *syari'ah* dan waktu dan tempat *syari'ah* akan *solih likulli zaman wa al-makan*. Gagasan *syari'ah* yang kontekstual dan implementasinya sesuai dengan kondisi serta wilayah pernah digagas oleh Abdullah Ahmed An-Na'im ketika menggagas tentang "*Syari'ah* Demokratik". *Syari'ah* yang tidak membelenggu umatnya, tetapi membuat umatnya sesuai dengan kondisi zaman dan wilayah sebab rumusannya seringkali berurusan dengan masalah-masalah lokalitas, bukan masalah universal.²⁰

Dengan demikian, *syari'ah* tidak hanya menjadi sebuah visi global tetapi juga dapat menjadi rahmat untuk semesta. Cara menjalankan *syari'ah* Islam seperti ini sebenarnya sudah dicontohkan dengan sangat bijak oleh para sahabat nabi. Ketika nabi wafat, sahabatnya tersebar keberbagai daerah. Mereka menjadi sumber inspirasi dan rujukan umat Islam yang ada didaerahnya masing-masing. Refleksi keagamaan yang mereka pantulkan selalu memperhatikan tempat dan waktu dimana mereka berada tentu dengan mendialogkan dengan pengalaman mereka bersama nabi dan tradisi nabi di Madinah. Sunnah nabi-pun merupakan refleksi beliau terhadap realitas yang mengitari dirinya dan refleksi beliau terhadap Al-Qur'an. Tradisi para sahabat yang sangat santun, bijak, toleran, dan menjadi rujukan oleh kaum *salafus salih* seringkali ditiadakan oleh kepentingan kelompok atau golongan yang berakibat pada perpecahan. Kisah-kisah para sahabat nabi yang sangat indah dapat ditemukan dalam riwayat.²¹

Oleh karena itu, pelaksanaan *syari'ah* tidak harus melakukan revivalisme atau mengembalikan sistem khilafah Islamiyah baik dengan cara intelek dan politik

²⁰ Zuly Qodir, *Syariah Demokratik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 35; Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syariah* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 177; Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam dan Negara Sekuler* (Bandung: Mizan, 2009), hlm. 394.

²¹ Mummad Chirzin, dkk., *Belajar dari Kisah- Kisah Para Sahabat* (Yogyakarta: Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah, 2005), hlm 234.

(HTI: Hizbut Tahrir Indonesia), apalagi dengan menggunakan kekerasan (Jamaah Anshorut Tauhid). Melaksanakan perintah *syari'ah* tidak harus mendirikan Negara Islam Indonesia (NII), melaksanakan *syari'ah* tidak harus melakukan tindak kekerasan dengan menghancurkan semua aktivitas yang dinilai bertentangan dengan Islam seperti tempat perjudian, pelacuran dan lain lain (FPI), karena ada koridor-koridor hukum yang diatur oleh konstitusi negara dimana *syari'ah* diamalkan. Bahkan menerapkan *syari'ah* tidak harus persis sama dengan aplikasinya pada masa awal Islam (Salafi), bukan hanya karena pertimbangan tempat dan waktu tetapi juga karena pesan Ilahi yang *genuine* yang turun pada abad ke tujuh hijriah dan sampai kepada manusia abad ke dupuluh satu (XXI) telah mengalami proses perjalanan sejarah yang sangat panjang. Ombak dan untaian debu sejarah telah banyak menutupi pesan-pesan Tuhan yang otentik. Walhasil, menjadi warga negara yang baik sesungguhnya berarti melaksanakan *syari'ah*.

Hal yang perlu dilakukan adalah memahami secara mendalam dan membaca secara terus-menerus sumber otoritas kita yakni Alquran dan Sunnah. Menangkap makna di balik simbolisme perintah agama, mengarungi dan menyelami esensi dan substansi yang terdapat di tengah dan di seberang lautan simbol-simbol agama menjadi hal yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Problemnya seringkali kita dan banyak orang malas mempelajari secara mendalam dan luas akan makna tersembunyi dari *syari'ah*, sehingga yang muncul adalah "akal pendek dalam memahami agama Islam sendiri". Dengan kata lain, tidak hanya terpaku pada amalan-amalan agama secara formalistik kemudian mengabaikan makna-makna substantif yang terdapat di balik formalisme tersebut. Sebagai orang Islam, melaksanakan *syari'ah* Islam secara *kaffah* (sebaik mungkin) adalah keharusan, tetapi menjadikan negara sebagai instrument implementatif satu-satunya tentu tidak realistis di "Negara Pancasila". Bernegara sambil bersyari'ah di Republik Pancasila ini adalah fakta empiris yang merupakan anugrah Allah yang wajib dijaga dan dipelihara oleh kita semua. Oleh sebab itu, gagasan sebagian pihak umat Islam yang hendak merubah Pancasila dengan dasar Islam sebenarnya sebuah gagasan yang bisa dikatakan mengada-ada apalagi jika argumennya adalah bahwa Pancasila hanyalah buatan manusia, sementara *Syari'ah* adalah buatan Tuhan. Sebuah ilusi terbesar sedang berkembang di Indonesia untuk merubah Negara Pancasila menjadi Negara Kekhalifahan.²²

Program Pendidikan Deradikalisasi

Dalam peringatan 10 tahun Bom Bali I, Marty Natalegawa menyebut para teroris telah gagal. Tetapi ucapan menteri yang mewakili Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu jelas perlu dikritik seiring dengan tertangkapnya jaringan teroris baru

²² Abdurrahman Wahid dan Mohammad Guntur Romli (ed), *Ilusi Negara Islam* (Jakarta: The Wahid Institute, Yayasan Bhineka Tunggal Ika dan Ma'arif Institute, 2009), hlm. 245.

oleh polisi. Memang, selama 10 tahun terakhir ini pemerintah sudah menangkap 700 tersangka teroris, 60 lebih ditembak mati, termasuk para gembongnya. Namun harus diakui, persoalan terorisme tidak mudah diurai, apalagi dituntaskan sampai ke akarnya. Bahkan ibaratnya ketika satu teroris berhasil dimatikan oleh polisi, 1000 yang lain muncul. Indonesia seperti tidak pernah kehabisan stok teroris. Mereka terus ada di sekitar kita. Adanya jaringan baru menjadi bukti bahwa teroris belum gagal bahkan telah meraih kemenangan dari sisi lain, yakni kemenangan wacana. Memang ada yang menyebut, hari-hari ini, perang melawan para teroris sudah memasuki kawasan yang lebih substantif yakni tidak semata-mata konflik fisik, melainkan sudah memasuki kawasan konflik gagasan atau adu kekuatan untuk merebut hati dan pikiran. Itulah perang gagasan dan ideologi tentang terorisme dan *counter of terrorism*.²³

Simak saja munculnya ratusan situs di internet yang berisi ajakan untuk masuk surga lewat jalan menjadi pembom bunuh diri. Di sana tertulis hal-hal seperti jika tidak mau menjalankan jalan terorisme, mereka yang membaca situs-situs itu akan dikutuk sepanjang hayatnya. Teknik membuat bom-pun diajarkan dengan jelas. Sayangnya, kita yang bukan teroris, kerap hanya berapologi daripada mencoba memenangkan wacana kontra terorisme. Sungguh memprihatinkan bahwa pemikiran para teroris kini justru mendapat tempat di masyarakat. Ada banyak ajakan menjadi “martir” atau orang kita senang menyebut menjadi “pengantin bom” di surga, seperti kita perhatikan beberapa tahun terakhir di Indonesia berulang kali terjadi pemboman tempat-tempat umum oleh sekelompok orang yang diduga keras sebagai pelaku terorisme di Indonesia.²⁴

Contohnya, tindakan atau aksi bom bunuh diri yang dulu dinilai sebagai tindakan biadab dan terkutuk, kini diyakini sebagai tindak kepahlawanan demi membela agama (mati *syahid*). Coba simak pemakaman setiap teroris yang mati dan diliput media, selalu ada arak-arakan seolah si teroris yang mati dalam serangan bom bunuh diri adalah orang benar. Memperhatikan hal diatas, jelas ada yang salah jika tindakan terorisme yang kekejamannya atas para korban di luar batas kemanusiaan justru mendapat dukungan dan pembenaran dari sebagian khalayak masyarakat. Ini jelas merupakan bentuk keberhasilan dari para konseptor terorisme di negeri ini. Media massa kita bahkan dengan sangat gegap gempita menyiarkan pemakaman yang oleh sebagian besar umat Islam sebagai teroris menjadi tontonan gratis rakyat Indonesia yang sangat bervariasi dalam memahami siapa sebenarnya teroris dan siapa sebenarnya “pahlawan Islam”. Sungguh merupakan pekerjaan yang tidak ringan untuk memberikan pemahaman pada publik mengenai isu radikalisis agama yang berhubungan dengan aksi terorisme.

²³ Edwar W Said, *The Mind of Terrorism* (USA: Booksmaxwell, 2006), hlm. 24.

²⁴ Abdul Munir Mulikhan, *Pengantin Bom dan Radikalisis di Indonesia* (Yogyakarta: Filosofi, 2011), hlm. 204.

Kita bahkan masih terus menyaksikan, para konseptor tersebut sampai sekarang terus bergentayangan dan tersembunyi di balik layar. Mereka mungkin sedang tertawa terkekeh karena masyarakat bisa dibujuk, direkrut dan sebagian kecil justru akhirnya bangga menjadi teroris serta rela menggadaikan jiwanya untuk ajaran terorisme. Para konseptor telah mampu merebut hati dan pikiran sebagian warga kita. Karena itu, tidaklah cukup kita hanya berapologi. Pasalnya para teroris jelas-jelas memakai dalil dan motif agama dalam aksi terornya. Mereka, yang termasuk pelaku bom bunuh diri, sudah sejak lama mengaitkan bom dengan agama. Mending Imam Samudera, pelaku peledakan bom Bali I, selalu menunjuk agama sebagai motif utama aksi terornya. Terdapat banyak kesaksian dari para mantan radikal yang sekarang kita kenal dengan sebutan teroris, bahwa aksi mereka sebenarnya merupakan aksi yang hanya menguntungkan kelompoknya namun mengatasnamakan umat.²⁵

Kita dapat menyaksikan bagaimana argumentasi yang disampaikan para teroris sesudah Imam Samudra juga berisi argumentasi teologis yang membela tindakan pegeboman. Para teroris selalu menyalahkan bukan hanya agama lain, tapi juga penganut *mainstream* dalam agamanya (Islam). Mereka dianggap telah sesat karena berkolaborasi dengan Barat, terutama Amerika. Bom bunuh diri adalah tindakan yang sah menurut keyakinan para teroris, sebagaimana pernah dituturkan Imam Samudra. Jadi adalah kejahatan yang mengerikan ketika para teroris sudah membajak agama dan menjadikan perjuangannya seolah-olah selaras dan tidak bertentangan dengan agama yang dianutnya. Bahkan tindakan kekerasan lewat bom dianggap sebagai bentuk perjuangan yang mulia. Kemuliaan dalam hidup dipertaruhkan dengan sebuah bom atau mati diujung senapan dianggap sebagai pahlawan Islam adalah hal yang sungguh mengerikan. Inilah tugas pendidikan Islam yang bisa dikatakan sangat berat memberikan perspektif lain tentang jihad dan pahlawan Islam itu seperti apa sebab pertarungan wacana Islam demikian terbuka.

Mark Juergensmeyer dalam buku *Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence*,²⁶ kita diajak lebih menyelami pemikiran para pelaku bom bunuh diri. Dalam buku itu dibebaskan konsep *cosmic war*, yakni peperangan antara yang baik dan yang jahat. Para pelaku bom bunuh diri yakin bahwa apa yang dilakukannya adalah berjuang membela agama melawan dominasi jahat (dalam hal ini Amerika/Barat), sehingga cara perjuangan bom bunuh diri adalah sah. Sebuah

²⁵ Mohammad Nurul Huda, *Aku Mantan Teroris* (Bandung: Mizan, 2010), 35. Buku ini berisikan kesaksian-kesaksian penulisnya terkait berbagai aksi yang dilakukan selama menjadi bagian dari aktivis radikalisme Islam. Nurul Huda sendiri sekarang aktif dalam kegiatan deradikalisasi Islam dengan memberikan beasiswa pendidikan pada anak-anak yang bapaknya ditangkap polisi karena aksinya sebagai aktivis radikalisme Islam.

²⁶ Juergensmeyer, *Terror in the Mind of God*; University of California Press, 2001; hlm. 230.

perspektif tentang pahlawan dan pembela agama yang dikonstruksi dengan sangat mengerikan, sebab agama Islam diposisikan sebagai agama yang lebih cenderung pada kekerasan, bukan pada jalan damai. Padahal Islam itu sendiri memiliki makna substansial sebagai agama yang damai, menyelamatkan dan menyejahterakan serta aman untuk semua makhluk hidup terutama manusia.

Di situlah kita sedang berhadapan dengan musuh besar agama-agama bernama teroris. Oleh sebab itu, untuk menghadapi musuh dibutuhkan sikap pengorbanan sebagai *shuhada* atau martir. Juergensmeyer menambahkan, "...suffering imparts the nobility of martyrdom...the image of cosmic war forge failure – even death – into victory". Jadi mereka yang mati demi agama dan Tuhan dan membunuh musuh agama serta musuh Tuhan dianggap sebagai martir yang mati suci. Pintu surga pun terbuka. Apalagipara teroris menyebut Indonesia sudah dimasukkan dalam wilayah perang dengan kekuatan kolonialis (Amerika atau Barat) yang menindas umat Islam. Oleh karena itu, dalam konteks peperangan seringkali muncul konsepsi bahwa perang merupakan hal yang nyata diharuskan untuk dilakukan sehingga semua caradihalalkan. Bagi para teroris, perang itu sungguh-sungguh nyata.

Karena itulah, jika kita hendak mengurai benang kusut terorisme, kita jangan hanya bereaksi dengan menyatakan terorisme tidak terkait agama. Mempertahankan penalaran dikotomi bahwa agama selalu baik dan kekerasan hanyalah penyimpangan oleh segelintir orang jelas hanya sebuah *excuse* (alasan) atau hanya sekadar membuat alibi. Jangan lupa bahwa agama juga dihayati oleh manusia-manusia yang seringkali tidak suci dan lebih condong kepada kejahatan. Disinilah agama seringkali bermata dua; mata satu adalah kebaikan, sementara mata satunya adalah kejahatan yang dihayati dan dilakukan oleh para penganutnya sendiri. Tidak usah berperilaku munafik menyatakan tidak ada dorongan kejahatan dari agama karena senyatanya ada banyak doktrin agama yang dipahami sebagai pendorong paling kuat atas kekerasan sehingga menjadi kekerasan berbasis agama. Itulah ambivalensi agama yang terjadi di tengah masyarakat.²⁷

Dengan mengakui adanya kaitan antara terorisme dengan agama, setidaknya para agamawan bisa memberi pencerahan dan melakukan moderasi terhadap umatnya. Penafsiran atau pemahaman keagamaan yang ekstrem dan radikal hanya akan menjebak penganut agama saling berperang. Penanggulangan aksi-aksi kekerasan, teror dan radikalisme dinilai sangat penting untuk mengelola keamanan di tanah air. Salah satunya dengan menyusun Program Nasional Kontra Radikal Terorisme yang baru saja dibahas bersama Wakil Presiden Boediono dan beberapa menteri terkait. Perhatikan pernyataan Boediono ketika menanggapi masalah terorisme di Indonesia, "Yang perlu saya tegaskan, ini bukan reaksi atas kejadian yang

²⁷ R Scott Appleby, *The Ambivalency of the Sacred* (USA: Maryland, 2004), hlm. 23.

terakhir di Depok atau Solo. Ini adalah program Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang sudah dirancang sejak beberapa waktu lalu”.

Program deradikalisasi ini dibentuk untuk menjangkau berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tidak hanya polisi maupun aparat keamanan lainnya, tapi juga seluruh kementerian, lembaga negara dan *civil society*. Termasuk di antaranya seluruh perguruan tinggi, ulama dan tokoh masyarakat. Pemerintah minta masyarakat dan pemuka agama mendukung program deradikalisasi dalam upaya mencegah aksi terorisme yang dimotori oleh BNPT.

Pemerintah juga berencana akan membuat cetak biru deradikalisasi. Menurut Boediono, program cetak biru deradikalisasi terorisme bukan program dadakan terkait aksi teroris yang marak belakangan terjadi. Ia mengatakan bahwa proyek cetak biru tersebut sudah dirancang beberapa waktu lalu. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan program tersebut tidak ditujukan kepada kelompok atau agama tertentu. Karena itu, dia meminta peran serta masyarakat dalam upaya mengikis paham garis keras dalam beragama. Seperti pernyataan Djoko Suyanto sebagai berikut:

Upaya penindakan sudah ada jalan, bekerjasama dengan Polri, Densus dan lain sebagainya. Deputi Pencegahan dan Program Deradikalisasi inilah yang harus mengemuka di dalam kegiatan-kegiatan ke depan. Ini bukan hanya dikerjakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, karena program ini juga harus melibatkan dan menjadi kepedulian lembaga dan kementerian lainnya, juga *civil society*; LSM, universitas, ulama, MUI dan lain sebagainya.

Perhatikan pernyataan Kepala BNPT, Ansyad Mbai, sebagai berikut,

“Mereka itu, para ulama dan masyarakat, adalah pelaksana program utama. Mereka sendiri yang tahu radikalisme itu apa. Apa yang mereka gunakan, doktrin agama apa yang mereka gunakan untuk mempengaruhi orang sampai jadi teroris. Ya, para ulama kita yang paling tahu dan mereka yang tahu untuk meluruskan itu. Bukan berarti ulama disuruh jadi intel dan melapor”.

Sebagai Kepala BNPT, Ansyad Mbai menyebutkan ulama adalah aktor utamanya untuk memberantas terorisme di Indonesia, bersama LSM dan masyarakat sipil lainnya.²⁸

Hal yang dilakukan Lembaga Studi Islam dan Politik (LSIP) pada tahun 2013 dengan pendidik-pendidikan guru agama di Yogyakarta dan kota Magelang

²⁸ Surat Kabar Harian Kompas Terbit pada Tanggal 10 September 2012.

untuk melakukan *training* dan diskusi rutin terkait tema fundamentalisme agama, radikalisme agama dan multikulturalisme merupakan salah satu cara yang dapat diapresiasi untuk membantu pelaksanaan program pendidikan deradikalisasi agama khususnya dikalangan pendidik agama Islam dan Kristen yang ada di Yogyakarta dan Kota Magelang. Tentu masih banyak aktivitas yang dilakukan oleh lembaga lain dalam memberikan respons atas radikalisme agama yang belakangan menguat.

Oleh sebab itu, dalam forum *Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan di Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada tanggal 07 April 2011 penulis mengemukakan bahwa melakukan tindakan preventif terhadap gerakan radikalisme akan jauh lebih baik dari pada tindakan kuratif lainnya, misalnya memerangi atau menghakimi. Tindakan preventif atau pencegahan tentu menjadi metode atau cara yang baik di tengah usaha untuk membersihkan Indonesia dari kasus-kasus terorisme yang terus berkembang.

Akan tetapi secara faktual bahwa terorisme yang diusung oleh kelompok Salafi Jihadi sudah menjadi kenyataan riil di masyarakat dengan berbagai tingkatan keterlibatannya. Ada yang terlibat setara dengan tokoh-tokoh besarnya seperti Amrozi, Imam Samudra, Umar Patek, Azahari dan sebagainya. Namun demikian juga ada yang masih berada satu tingkat atau dua tingkat di bawahnya. Terhadap kelompok yang seperti yang pertama ini, maka tentu tidak mudah untuk mengajak kembali dan bahkan tidak akan mungkin untuk memperoleh kesadaran baru. Hanya orang seperti Nasir Abbas saja yang bisa berubah setelah tentu saja memperoleh hidayah tentang tindakannya yang melawan *sunnatullah*, tentang kerukunan dan keharmonisan sosial tersebut.²⁹

Namun, di sisi lain juga masih menyisakan kemungkinan bagi yang lain yang belum mencapai derajat sangat tinggi dalam kebencian dan kemarahannya terhadap Barat dengan segala tipu dayanya. Kita ketahui bahwa mereka yang tergolong sebagai kaum radikal adalah mereka yang sangat membenci Barat dan seluruh jaringannya. Barat dengan segala kebijakan dan strateginya tidak ada yang menguntungkan umat Islam, sehingga pantaslah jika keberadaannya kemudian diganggu dan dibom melalui gerakan terorisme. Terhadap yang belum mencapai derajat sebagaimana di atas, maka masih dimungkinkan untuk diajak kembali kepada jalan yang sesuai dengan tujuan mendirikan bangsa dan negara. Dan bahkan juga kembali kepada Islam moderat. Meskipun tidak mudah akan tetapi masih ada kemungkinan untuk perubahan dimaksud.

Sebagaimana telah diungkapkan panjang lebar diatas bahwa jalan yang terbaik ke depan untuk mengusung deradikalisasi adalah dengan membangun

²⁹ Zuly Qodir, "Respon Pendidikan Terhadap Terorisme", *makalah diskusi ahli*, Yogyakarta pada Tanggal 9 September 2012.

deradikalisasi agama melalui lembaga pendidikan. Kiranya sangat diperlukan gerakan *review* kurikulum di berbagai tingkatan pendidikan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan tindakan anti radikalisasi agama ini. Pendidikan agama di sekolah lebih banyak diisi dengan Fikih, terutama Fikih ibadah. Mulai dari SD hingga SMA bahkan Perguruan Tinggi (PT), maka yang diajarkan adalah persoalan *thaharah* sampai mengurus jenazah. Makanya, yang banyak diperbincangkan adalah bagaimana agar mereka menjadi taat beribadah, meskipun yang diperoleh terkadang hanya pada tataran pengetahuan beribadah dan bukan pengamalan beribadah.

Bukannya pendidikan agama terutama ajaran Fikih tidak penting, akan tetapi juga sangat penting diajarkan aspek lain dari ajaran agama yang relevan dengan konteks sosial keazamanan. Ketika gerakan terorisme mengusung jihad ofensif di dalam memahaminya, misalnya melalui *suicide bombing*, teror dengan kekerasan dan sebagainya, maka tentu harus diajarkan tentang makna jihad secara memadai. Yaitu terdapat pengertian jihad yang moderat yakni bekerja keras untuk mencapai tujuan yang sangat baik terutama untuk kemaslahatan umat. Sehingga janganlah jihad tersebut dihapus dari mata ajaran karena konotasinya yang disalahartikan. Namun, justru harus ada upaya yang memadai untuk memberikan penjelasan secara memadai. Tentu saja juga harus ada seorang guru atau *ustadh* atau dosen yang bisa menjelaskan tentang makna jihad yang bernuansa *rahmatan lil alamin*. Makanya, para pendidikpun perlu diseleksi secara memadai agar tidak mengajarkan Islam atau agama apapun sesuai dengan konsepsi kaum radikal.

Itulah sebabnya diperlukan suatu strategi agar para pendidik tidak menjadi agen bagi pengembangan radikalisme agama. Oleh karena itu, tanggung jawab pimpinan pada setiap lembaga pendidikan adalah memastikan bahwa gerakan radikalisasi tersebut tidak terdapat di lembaganya. Dengan cara seperti ini, maka gerakan radikalisasi akan dapat diminimalisasikan di masa depan.

Program Deradikalisasi Baru

Daripada kita hanya sibuk membuat alibi bahwa agama tidak terkait sama sekali dengan terorisme lebih baik terus berupaya memenangkan wacana bahwa terorisme itu jahat dan biadab. Namun, kita jangan sampai memusuhi umat beragama lain atas kian diterimanya terorisme yang memanfaatkan agama. Kita juga jangan keliru dan terjebak dengan menyalahkan agama (apapun) yang sudah ada sebelum adanya terorisme. Mari kita mencari jawaban. Mengapa dalam perang melawan terorisme, para teroris justru terkesan menang dalam perebutan hati dan pikiran sehingga mendapat simpati dan dukungan dari sebagian publik? Apakah pemerintah dan hukum kita tidak tegas dan banyak memberi peluang bagi

suburnya paham radikalisme? Mengapa pula Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme hanya menjadi macan kertas?

Program deradikalisasi terorisme harus dievaluasi total. Perlu disusun konsep baru sehingga kelak tidak ada lagi orang muda kita yang bisa dibujuk atau dicuciotaknya untuk menjadi teroris. Program deradikalisasi ini harus digalakkan sejak dini kalau perlu sejak pendidikan dasar. Bukan hanya terfokus di Perguruan Tinggi sebagaimana berlangsung selama ini. Brosur atau sosialisasi program deradikalisasi disediakan di ruang publik. Keluarga sebagai institusi dasar dan terkecil dalam sistem sosial perlu dilibatkan dalam program ini.

Intinya, segala yang berpotensi menumbuhkan terorisme secara sosial, politik, ekonomi dan sebagainya harus diantisipasi. Karena itu dibutuhkan sinergi dari banyak pihak. Sebagaimana perang melawan kejahatan yang tiada mengenal kata akhir mungkin demikian juga dalam menghadapi terorisme ini. Indonesia memiliki banyak nilai toleransi yang berasal dari keragaman budaya. Bahkan keragaman itu dinilai bisa menjadi contoh bagi negara lain. Oleh karena itu, dibutuhkan seorang pemimpin yang berani untuk dapat mengatasi isu-isu minoritas.

Perhatikan pernyataan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia ketika memberikan ceramah yang diselenggarakan oleh CDCC di Jakarta: "Ketika minoritas diserang, ini akan menjadi tanggung jawab pemerintah. Sama seperti ketika rumah saya diserang dan saya harus melapor pada polisi, karena ini merupakan hak saya. Karena itu dibutuhkan pemimpin yang berani untuk menyelesaikan masalah seperti ini," kata Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Sig Traavik di kantor *Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations* (CDCC).³⁰

Di Indonesia, dia menambahkan sangat banyak nilai toleransi yang bisa disaksikan secara langsung. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya etnis, budaya, dan perbedaan agama. Semua itu bisa hidup dengan damai, bahkan Indonesia juga punya tradisi saling pengertian dan saling membantu. Traavik pun mengatakan, membina toleransi bukanlah hal yang menyenangkan bahkan dapat dikatakan sangat membosankan. Apalagi media lebih berminat membuat artikel mengenai konflik dibandingkan toleransi. Konflik dipandang media lebih menarik untuk diekspos. "Norwegia selalu dipandang oleh negara lain sebagai negara yang sangat menjunjung tinggi HAM. Namun, perjalanan Norwegia dalam membina toleransi beragama dan menjunjung tinggi HAM, membutuhkan proses yang panjang juga," ujarnya. Salah satu pengalaman yang bisa dibagi oleh Norwegia kepada Indonesia adalah pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi. Traavik mengakui bahwa perempuan telah menjadikan Norwegia menjadi negara yang kaya. Menurutnya,

³⁰ CDCC Jakarta pada Hari Selasa pada Tanggal 16 April 2013 seperti dilansir www.shnews.com dan www.kompas.com.

perempuan di Norwegia memiliki pendidikan dan pekerjaan yang baik. Negara itu juga memiliki taman kanak-kanak dan sekolah yang bagus.

Oleh karena itu, sejak kecil anak-anak Norwegia sudah dididik mengenai nilai kemanusiaan yang baik. “Orang tua mereka juga tidak perlu khawatir ketika menyekolahkan anaknya di pagi hari, lalu mereka bekerja di siang hari dan menjemput anaknya di sore hari,” ucapnya. Dia menambahkan, Norwegia juga tidak pernah ada kuota jumlah pejabat perempuan. Norwegia memandang perempuan memiliki keunggulan tersendiri dan mereka cukup berpengaruh pada ekonomi.

Simpulan

Setelah Perang Dingin, perhatian Barat tertuju ke Timur Tengah dengan membawa beberapa misi. *Pertama*, kepentingan ekonomi atau minyak. *Kedua*, Islam dan sistem budaya yang berbeda antara Timur Tengah dengan Barat. Bersamaan dengan itu keluar buku karya Samuel P. Huntington yang berjudul *The Clash of Civilization and The Remaking Politics* pada tahun 1999. Terbitnya buku ini seolah memberikan justifikasi adanya benturan budaya Timur dan Barat. Dalam buku ini disebutkan bahwa kontradiksi antara sistem budaya Timur dan Barat menjadi pemicu konflik yang terjadi di Timur tengah.

Ada dua jenis teror di dunia yaitu teror fisik dengan aksi *violenced* dan teror non fisik atau *terror of mind*. Ada teror yang merupakan bagian dari perang tetapi ada pula yang menjadi bagian dari aksi teror masyarakat sipil. Teror yang terjadi di Indonesia dalam kurun 10 tahun terakhir setelah era reformasi adalah teror bukan dalam kondisi perang fisik dengan menggunakan senjata, sekalipun aksi yang dilakukan kadang mempergunakan senjata, sebenarnya lebih pada teror sipil (*civil terrorism*) karena terjadi di negara damai. Sedang teror yang menjadi bagian dari perang, seperti antara Israel dan Palestina. Masih terkait adanya ancaman peledakan bom di Indonesia belakangan ini yang membuktikan bahwa terorisme masih menjadi ancaman serius meskipun para pelaku teror telah banyak yang ditembak, ditangkap dan dihukum.

Kini, mereka sudah berani terang-terangan melakukan serangan secara terbuka. Bahkan masjid pun menjadi target serangan. Bom bunuh diri di masjid itu menjadi bukti otentik bahwa terorisme tidak ada kaitannya dengan agama Islam. Karena itu, pihak-pihak yang selama ini mengaitkan aksi bom dengan agama agar berhenti memojokkan Islam. Semua sepakat, aksi terorisme seperti itu harus diberantasakan tetapi tidak bisa dilakukan oleh aparat kepolisian sendiri. Cara pengamanan dan tindakan represif saja tidak cukup karena serangan teroris di Indonesia berwatak ideologis.

Diakui atau tidak, penanganan terorisme selama ini masih mengacu pada kekuatan senjata. Sementara itu, peran masyarakat sipil dan intensitas dialog cenderung dipinggirkan dan bahkan diabaikan. Padahal tidak dilibatkannya masyarakat sipil serta kurangnya dialog justru membuat pemberantasan terorisme tidak mengenai sasaran karena tidak mampu membasmi akar terorisme, terutama yang muncul akibat radikalisisasi pemahaman agama. Metode pemberantasan terorisme di Indonesia masih sama dengan cara yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada zaman George W. Bush, yaitu *pre-emptive action*. Dan, cara itu ternyata gagal. Bahkan cara perang yang dilakukan Amerika itu justru membawa Amerika ke dalam kemerosotan. Cara seperti ini justru memunculkan terorisme baru karena menimbulkan dendam yang berkepanjangan. Jika cara semacam ini terus berlanjut, termasuk di Indonesia, maka militansi para teroris akan semakin bertambah. Akibatnya, mereka bisa semakin brutal dalam melakukan serangan. Sudah banyak para pelaku teror ditangkap akan tetapi karena ideologinya masih tumbuh subur, teror bom terus terjadi di Indonesia. Tidak berhasilnya cara represif dalam membendung radikalisme dan terorisme ini sebenarnya sudah disadari oleh banyak pihak, termasuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada 2006, PBB telah mengeluarkan resolusi yang menyebutkan pentingnya peran kelompok masyarakat sipil dalam memberantas terorisme dan radikalisme. Namun, implementasi resolusi itu juga masih lemah, termasuk di Indonesia.

Memperhatikan fenomena radikalisisasi yang terjadi di dunia pendidikan (menengah atas dan pendidikan tinggi), hal yang harus dilakukan oleh lembaga dan para pendidik adalah bagaimana memberikan pemahaman yang konprehensif tentang berbagai macam agama, sekurang-kurangnya memberikan pemahaman pada para siswa dan mahasiswa bahwa keragaman agama yang ada di muka bumi, termasuk di Indonesia, bukanlah sebuah kesalahan atau pun dosa asal, tetapi itulah realitas sosiologis. Kita hanya diberi tugas menyampaikan *risalah*, apakah yang kita anggap ‘salah’ atau ‘menyimpang’ tersebut bersedia atau tidak akan ajakan kita merupakan hal yang bukan kewajiban kita. Sebagai muslim tentu kita berharap setiap muslim secara sesungguhnya berupaya mengamalkan ajaran-ajaran pokok dan *sunnah* Nabi Muhammad saw., tetapi semuanya merupakan sebuah proses beriman bukan sekali jadi. Kita harus yakin bahwa dakwah yang disampaikan kepada masyarakat dengan metode yang ‘galak’ dan memaksa hanya akan menjauhkan mereka dari agama bukan semakin mendekatkan mereka yang masih belum mentaati semua ajaran Tuhan dan Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, kita patut memperhatikan hasil penelitian Carl Ungerer dari Australia Strategic Policy Institute menyimpulkan bahwa dari tiga terpidana terorisme Indonesia yang diwawancarai dalam risetnya, 30 persen tidak mempan dengan program deradikalisasi. Mereka tetap akan melanjutkan jihad globalnya melawan negara-negara Barat dan pihak-pihak yang dianggap sebagai pihak alienasinya.

Sebagai ormas yang moderat, Nahdlatul Ulama (NU) memberikan perhatian lebih terhadap masalah terorisme di Indonesia. Dalam berbagai kesempatan, NU telah aktif mengampanyekan Islam yang moderat dan anti terorisme, baik dalam forum-forum nasional maupun internasional. Kesadaran menangkal terorisme itu harus dimulai dari kelompok yang paling kecil dalam masyarakat, yaitu keluarga. Untuk mengakhiri tulisan ini, maka dalam pandangan penulis, ada beberapa aspek dan pendekatan yang perlu dipertimbangkan dalam menangkal terorisme secara menyeluruh. *Pertama*, aspek ideologis. Karena akar terorisme adalah pemahaman ideologi yang salah, maka perhatian aparat tidak boleh hanya tertuju pada bentuk terornya saja. *Kedua*, aspek regulasi. Untuk memberantas terorisme tentu perlu aturan yang cukup agar aparat bisa bergerak di lapangan dengan langkah-langkah yang terukur. Jangan sampai langkah yang dilakukan aparat justru dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM). *Ketiga*, aspek *political will*. Dalam hal ini, kepala negara perlu tegas mengambil sikap dalam menangani terorisme yang terus mengancam. Kepala negara bisa menggerakkan semua elemen bangsa Indonesia dalam rangka melakukan penanganan terorisme secara terpadu. Terpadu artinya tidak bisa hanya mengandalkan aparat keamanan seperti polisi, tetapi sekaligus melibatkan dunia pendidikan dari tingkat menengah sampai perguruan tinggi; sebab seperti kita ketahui belakangan aktivitas teroris dan radikalisisasi yang berbasis agama bergerak di institusi pendidikan, baik lembaga pendidikan berlatar belakang keagamaan maupun tidak.

Pendekatan yang dapat dilakukan yang pertama yaitu secara dialogis. Dialog merupakan jalan yang tepat untuk mengantisipasi radikalisisasi dan efektif untuk mengubah cara berpikir seseorang agar tidak radikal. *Kedua*, pendekatan kewilayahan. Karena para teroris di Indonesia bergerak di 'bawah tanah', maka penanganan terorisme tidak bisa ditempuh di 'atas tanah'. Di sinilah pendekatan intelijen sangat diperlukan. *Ketiga*, pendekatan keamanan dan represi (*security and repressive approach*). Tugas negara, terutama kepolisian, adalah menciptakan rasa aman di masyarakat dari ancaman terorisme.³¹ Kerjasama aparat keamanan dan masyarakat dalam praktek memberantas teroris yang selama ini tampak kurang berjalan dengan baik perlu mendapatkan perhatian serius. Demikian pula institusi pendidikan harus dilibatkan dalam penanganan radikalisisasi yang sering mengarah pada aktivitas teroris karena dorongan ideologi dan politik kelompok tertentu yang kecewa dengan kondisi yang berkembang dilingkungan sekitarnya.

³¹ Republika Terbit pada Tanggal 24 September 2011.

Rujukan

- An-Na'im, Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- An-Na'im, Abdullah Ahmed, *Islam dan Negara Sekuler*, Bandung: Mizan, 2009.
- Appleby, R Scott, *The Ambivalency of the Sacred*, USA: Philadelphia Press, 2004.
- Bellah N, Robert, *Beyond Belief: Gagasan tentang Civil Religion di Amerika*, Jakarta: Paramadina, 2003.
- Berger, Peter L., dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Kajian Sosiologi Pengetahuan*, Jakarta: LP3ES, 1987.
- Beyer, Peter, *Religion and Globalization*, New York: Sage Publication, 2002.
- Casanova, Jose, *Agama Publik: Agama di Era Modern*, Malang: Resist dan UMM Press, 2007.
- Chirzin, Muhammad, dkk., *Belajar dari Kisah- Kisah Para Sahabat*, Yogyakarta: Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah, 2005.
- El-Fadhl, Khaled Abou, *Atas Nama Tuhan*, Jakarta: Serambi, 2004.
- Esack, Farid, *Al Quran, Pluralism and Liberalism*, USA: Pinguin Books, 2001.
- Gurr, Ted Robert, *Why Men Rebel*, USA: Bookswell, 1969.
- Heryanto, Ariel, *State Terrism and Democracy in Indonesia*, Singapura: ISEAS, 2007.
- Huda, Muhammad Nurul, *Aku Mantan Teroris*, Bandung: Mizan, 2010.
- Huntington, Samuel P, *The Clash of Civilization and The Remaking Politics*, USA, California, MIT Messachuset, 1999.
- Juergensmeyer, Mark, (ed.), *Religion, Globalization and Civil Society*, Toronto; Sage Publication, 2009.
- Juergensmeyer, Mark, *Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence*, California, USA: Maryland, 2000.
- Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2010.
- Manheim, Karl, *Sosiologi Pengetahuan: Pertautan Pengetahun dan Politik*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.

- Martha, David, *Psychology of Religion*, Oxford, England: London, 2002.
- Mulkhan, Abdul Munir, *Pengantin Bom dan Radikalisasi di Indonesia*, Yogyakarta: Filosofi, 2011.
- Nimer, Mohammad Abu, *Nir Kekerasan dan Bina Damai dalam Islam: Teori dan Praktek*, Diterj.oleh: Irsyad Rafsyadi dan Khairil Azhar, Bandung: Alfabet dan Paramadina, 2010.
- Qodir, Zuly, *Syari'ah Demokratik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Qodir, Zuly, "Kesalahpahaman Multikulturalisme", *Kompas* Terbit pada Tanggal 26 Februari 2013.
- Qodir, Zuly, "Respon Pendidikan Terhadap Terorisme", *Makalah Diskusi Ahli*, Diseminarkan di Yogyakarta pada Tanggal 9 September 2012.
- Said, Edward W, *The Mind of Terrorism*, USA: Philadelpia, 2006.
- Singh, Bilveer, *Talibanization and Extremisme in Southeast Asia*, Singapura: ISEAS, 2007.
- Smart, Ninian, *One God and Others Name in the World*, USA: Temple University Press, 2002.
- Stompka, Pior, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Kencana, 2009.
- Republika Terbit Tanggal 24 September 2011.
- Wahid, Abdurrahman, dan Mohammad Guntur Romli (ed.), *Ilusi Negara Islam*, Jakarta: The Wahid Institute, Yayasan Bhineka Tunggal Ika dan Ma'arif Institute, 2009.
- Wahid, Abdurrahman,dkk., *Islam Nir Kekerasan*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Wawancara Informal dengan Irfan S Awwas di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada Tanggal 20 Februari 2013.
- www.shnews.com dan www.kompas.com/18/4/2013